KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Indonesia Tanpa Migas, Mungkinkah?
Tanggal : Senin, 16 Maret 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 6

Indonesia Tanpa Migas, Mungkinkah?

Eddy Soeparno
Wakil Ketua MPR RI, Anggota Komisi XII DPR

Beberapa hari terakhir, masyarakat Indonesia dihebohkan dua berita besar. Pertama, eskalasi konflik geopolitik menjadi perang terbuka antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Kedua, ketersediaan cadangan migas Indonesia yang hanya cukup untuk 20 hari.

Di masa lalu, ketegangan geopolitik, pengurangan suplai minyak mentah global, atau kerusakan infrastruktur migas akan membuat harga minyak mentah dan gas naik. Apalagi, saat perang ini, kita melihat lonjakan harga migas di atas 25 persen hanya dalam hitungan hari akibat penutupan Selat Hormuz, urat nadi lalu lintas migas di Timur Tengah.

Disrupsi energi akibat anjloknya pasokan migas dari Timur Tengah akan membuat negara pengimpor migas besar seperti China, India, Jepang, dan Korea Selatan—yang lebih dari separuh impor migasnya dari Timur Tengah—pontang-panting mencari sumber baru.

Mereka akan berupaya mencari pemasok di negara lain, termasuk negara yang selama ini menjadi pemasok migas Indonesia. Jadi, Indonesia akan berebut memenuhi kebutuhan migasnya dengan negara-negara pengimpor raksasa di atas.

Lebih dari itu, mengapa Indonesia begitu tergantung pada migas yang menghasilkan emisi CO_2 dan berasal dari sumber impor? Padahal, Indonesia memiliki kekayaan sumber energi baru dan terbarukan (EBT) begitu besar, yang jika dikembangkan dapat mengurangi ketergantungan pada migas dan sumber energi impor lainnya.

Indonesia mengalami paradoks energi sejak lama. Kita memiliki kekayaan energi fosil sangat besar, seperti batubara dan migas. Kita juga punya sumber EBT berlimpah, khususnya surya, angin, dan hidro.

Namun, faktanya, kebutuhan energi nasional masih tergantung pada impor, khususnya minyak mentah, gas, dan LPG. Memang Indonesia menjadi *net importer* migas sejak 2004, tetapi kondisi ini adalah dampak *under investment* sektor migas sejak tahun 1990-an.

Sesungguhnya kita bisa mengurangi ketergantungan pada energi fosil dengan mempercepat pengembangan sumber EBT seperti energi surya, angin, air, dan panas bumi. Dengan demikian, kita bisa mengganti energi fosil dengan energi bersih, sekaligus menurunkan kebutuhan impor yang membebani APBN.

Pertanyaan berikutnya, jika Indonesia mampu mengembangkan potensi EBT yang dimiliki, apakah kita bisa melepas ketergantungan pada minyak dan gas yang selama ini menjadi sumber emisi CO_2, sekaligus menyedot devisa negara?

Sayang sekali jawabannya "tidak", karena sejumlah kegiatan ekonomi dan industri masih mengandalkan minyak mentah dan gas sebagai bahan bakunya, seperti industri petrokimia, pupuk, plastik, tekstil, dan farmasi. Bisa dibayangkan jika pasokan migas terhenti, Indonesia tidak akan memiliki pupuk untuk pertanian, plastik untuk kemasan, serta serat sintetis untuk produksi tekstil.

Sektor terbesar yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap minyak mentah adalah transportasi. Meskipun penjualan kendaraan listrik meningkat akhir-akhir ini, penggunaan mobil dan sepeda motor masih didominasi mesin konvensional. Kita juga belum mengenal istilah pesawat dan kapal listrik skala komersial sehingga keduanya sangat tergantung pada avtur dan *bunker fuel* yang bersumber dari minyak mentah.

Sungguh tidak terbayangkan jika perang di Timur Tengah berkepanjangan dan pasokan migas global langka. Jika skenario terburuk itu terjadi, mobilitas masyarakat praktis terhenti karena seluruh moda transportasi tidak mendapatkan pasokan bahan bakar.

Ketergantungan dunia terhadap sumber energi fosil, khususnya minyak mentah, gas, dan batubara, selama ini terlihat dari besarnya konsumsi energi fosil dalam kurun waktu 50 tahun terakhir.

Jika pada 1980 konsumsi energi global dari sumber migas dan batubara adalah 81 persen, tahun 2024 angka itu turun sedikit ke 78 persen. Setali tiga uang, konsumsi energi fosil Indonesia tercatat sebesar 98 persen (1980) dan hanya turun menjadi 89 persen (2024).

Memang penurunan konsumsi energi fosil lebih tinggi di sektor kelistrikan ketimbang sektor energi. Saat ini bauran EBT di Indonesia sudah mencapai sekitar 15 persen dan pemerintah tengah mengakselerasi pengembangan sumber EBT agar mencapai 33 persen tahun 2034, sejalan dengan target dekarbonisasi untuk mencapai *net zero emission* pada tahun 2060 atau lebih awal.

Namun, yang perlu dipahami bersama, sampai adanya substitusi untuk minyak mentah, gas alam, dan batubara, maka energi fosil masih akan mendominasi pergerakan roda perekonomian nasional.

Perlunya revisi UU Migas

Mengingat pemanfaatan energi fosil masih berlangsung cukup lama, Indonesia perlu menata industri migasnya, khususnya melalui revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas).

Di saat sumur-sumur migas nasional relatif tua dan mengalami *natural decline*, diperlukan penemuan sumber migas baru melalui eksplorasi dan pengeboran. Karena biaya dan teknologi yang diperlukan cukup besar dan canggih, revisi UU Migas perlu menghadirkan iklim investasi yang menarik agar pelaku usaha migas yang memiliki pengalaman, teknologi, dan akses pendanaan kuat turut meningkatkan *lifting* migas nasional ke target 1 juta barel per hari di tahun 2030.

Revisi UU Migas juga penting agar pengembangan sektor hidrokarbon dilaksanakan berdasarkan platform berkelanjutan (*sustainable*), serta mengembangkan sektor usaha karbon rendah seperti CCS (*Carbon Capture Storage*).

Pembenahan kedua ialah penguatan kebijakan untuk menjaga kepercayaan investor. *Policy consistency*, *clarity*, dan *coordination* merupakan kata-kata kunci agar Indonesia menarik dan dipercaya oleh investor migas untuk menanamkan miliaran dolar AS di sektor migas nasional.

Akhirnya kita harus menerima kenyataan, ketergantungan dunia, termasuk Indonesia, terhadap sektor migas masih tinggi, baik kini maupun masa datang. Target pertumbuhan ekonomi 8 persen akan menggenjot hilirisasi dan industrialisasi sehingga minyak mentah dan gas tetap dibutuhkan sektor industri dan transportasi.

Namun, kita tidak bisa lengah. Program transisi energi harus tetap berjalan agar menggantikan peran energi fosil yang sarat CO_2 dengan hijau dan bersih. Kita berharap kemajuan teknologi energi bersih seperti baterai berkapasitas tinggi dan hidrogen semakin terjangkau untuk menggantikan BBM di sektor transportasi.

Meski perjalanannya masih panjang, kita berkewajiban membangun "Indonesia Tanpa Migas" sekaligus "Indonesia Tanpa Emisi Karbon" bagi generasi mendatang.

Rubrik ini menerima artikel dengan topik aktual, relevan dan menyangkut kepentingan publik. Artikel hanya dikirim ke Opini Kompas. Panjang artikel maksimal 5.000 karakter dengan spasi. Kirim ke **www.kompas.id/kirim-opini**

POJOK

Survei LPM UI: Ekonom-praktisi pesimistis. *Ada yang bilang, fundamental kita kuat.*

◆

Memecah kepadatan arus mudik 2026. *Sudah biasa, kerjaan rutin tahunan.*

◆

Mengaku "lepat" (salah) melalui ketupat. *Inilah wujud kearifan lokal.*

mang Usil